



KOMINFO

LAPORAN ISU HOAKS

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Senin, 6 September 2021

1. [HOAKS] Aplikasi PeduliLindungi telah Disalahgunakan oleh Pemerintah

Penjelasan :

Beredar sejumlah informasi melalui *thread* media sosial Twitter yang mengklaim bahwa aplikasi PeduliLindungi telah disalahgunakan oleh oknum di dalam pemerintahan yang juga pelaku usaha untuk menambang data. Disebutkan pula bahwa aplikasi ini dipakai pemerintah untuk memata-matai pengguna kartu vaksinasi, sehingga telah menginspirasi para *hacker* untuk mengontrol ponsel WNI lewat *database* PeduliLindungi.

Faktanya, berdasarkan syarat penggunaan aplikasi PeduliLindungi, Pengguna dan/ atau Pelanggan dilarang untuk: (b) Mengambil, mengunduh, memungut atau menyimpan informasi pribadi tentang pengguna lain; dan (c) Menggunakan program-program seperti robot, *spider*, *scraper* atau cara otomatis atau manual lainnya untuk mengakses, memantau atau menyalin konten dan/ atau informasi apapun di aplikasi dan situs PeduliLindungi. Adapun data-data pengguna disimpan secara terenkripsi di *server* PeduliLindungi yang aman dan tidak dibagikan ke publik. Data hanya akan diakses bila pengguna dalam risiko tertular COVID-19 dan perlu segera dihubungi oleh petugas kesehatan. Data pengguna tidak akan diserahkan atau disebarluaskan kepada pihak lain kecuali kepada instansi pemerintah yang saat ini ditunjuk dalam menangani pandemi COVID-19, atau karena ketentuan hukum.

Selain itu, aplikasi PeduliLindungi digunakan untuk kegiatan pengamatan secara sistematis dan konsisten terkait COVID-19 untuk mewujudkan tindakan penanggulangan secara efektif (*surveilans* kesehatan), bukan untuk memata-matai. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menkominfo Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi Pedulilindungi dalam rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana diubah oleh Keputusan Menkominfo No. 253 Tahun 2020.

Kemudian, mengenai tuduhan bahwa pemerintah menginspirasi *hackers* global mengontrol ponsel WNI lewat *database* PeduliLindungi, Klaim tersebut tidak berdasar. Pasalnya, aplikasi PeduliLindungi tidak dapat mengontrol ponsel siapapun. Adapun aplikasi PeduliLindungi hanya akan merekam data *proximity* (kedekatan) satu telepon seluler (ponsel) dengan ponsel lainnya dalam format terenkripsi. Aplikasi juga tidak merekam data geolokasi pengguna. Sedangkan nomor ponsel yang didaftarkan akan direlaskan dengan ID *random* di dalam *server* yang aman. Data tidak akan diakses, kecuali jika pengguna dalam risiko tertular Covid-19 dan perlu segera dihubungi oleh petugas kesehatan.



Hoaks

Link Counter:

- <https://pedulilindungi.id/svarat-ketentuan>
- <https://pedulilindungi.id/kebijakan-privasi-data#1-cara-kerja-pedulilindungi>
- https://www.kominfo.go.id/content/detail/36760/siaran-pers-no-317hmkominfo092021-tentang-penjelasan-pemerintah-sehubungan-dengan-penyebaran-informasi-sertifikat-vaksinasi-covid-19-presiden-joko-widodo/0/siaran_pers
- <https://techno.okezone.com/read/2021/09/04/54/2466047/kominfo-pastikan-sertifikat-vaksin-presiden-jokowi-yang-bocor-bukan-dari-pedulilindungi>
- <https://covid19.go.id/p/regulasi/keputusan-menteri-komunikasi-dan-informatika-republik-indonesia-nomor-253-tahun-2020>
- https://idih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/735/t/keputusan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+171+tahun+2020



KOMINFO

LAPORAN ISU HOAKS

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Senin, 6 September 2021

2. [HOAKS] Video Scan QR pada Bekas Suntikan Vaksin Covid-19



Penjelasan :

Beredar sebuah video sekelompok orang tengah melakukan *scan* QR pada lengan seseorang. Unggahan berbahasa asing tersebut disertai klaim bahwa terdapat kode QR pada lengan tepat di bekas suntikan vaksin Covid-19.

Dilansir dari [reuters.com](https://www.reuters.com), klaim tersebut salah. Louis-James Davis, pendiri perusahaan teknologi pemindaian kode VCode dan pencipta paspor kesehatan digital untuk mengatasi pandemi, mengatakan bahwa vaksin tidak dapat digunakan untuk menyuntikkan informasi yang bersifat individu. Dia menambahkan bahwa kode QR adalah simbol visual dan hanya akan beroperasi dalam bentuk tato atau tanda fisik lainnya. Terkait dengan video yang beredar tersebut, Davis berkata video itu kemungkinan menggunakan pembaca QR *Near Field Communication* (NFC) gabungan yang bisa mengambil *tag* NFC di pakaian pada jarak dekat. Sementara itu, orang yang merekam video asli mengakui bahwa mereka telah menggunakan sebuah aplikasi saat membuat video tersebut.

Hoaks

Link Counter:

- <https://www.reuters.com/article/factcheck-coronavirus-australia/fact-check-video-does-not-show-qr-code-at-covid-19-vaccine-injection-site-idUSL1N2Q6060>



KOMINFO

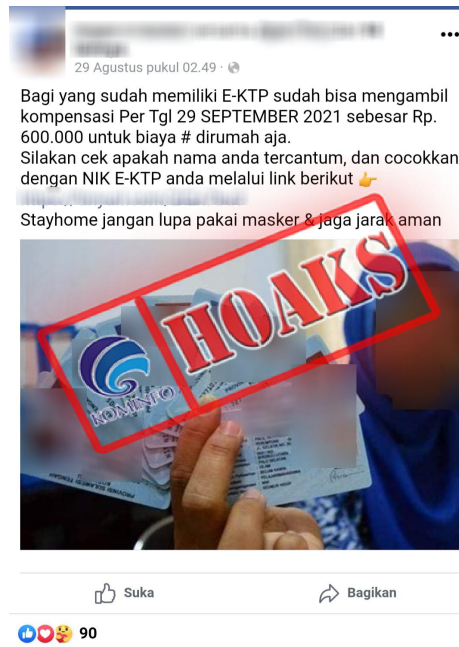
LAPORAN ISU HOAKS

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Senin, 6 September 2021

3. [HOAKS] Link Bansos Rp600.000 Cair September Bagi Pemilik E-KTP



Penjelasan :

Beredar di media sosial Facebook, informasi yang menyebutkan *link* bantuan Rp600.000 bagi warga yang sudah memiliki e-KTP akan cair pada 29 September 2021.

Faktanya, dilansir dari [kompas.com](https://www.kompas.com), Kepala Biro Humas Kemensos Hasim menegaskan, informasi tersebut tidak benar alias hoaks. Informasi semacam ini merupakan hoaks berulang yang sudah sering beredar dengan berbagai versi narasi dan *link* yang berbeda-beda. *Link* tidak resmi seperti ini diduga sebagai *phishing* untuk mencuri data pribadi seseorang. Oleh karena itu, masyarakat harus waspada dan tidak mengakses tautan yang mencurigakan serta tidak memberikan data-data pribadi.

Hoaks

Link Counter:

- <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/06/070500965/-hoaks-link-bansos-rp-600.000-cair-september-bagi-pemilik-e-ktp?page=2>
- <https://www.instagram.com/p/CSIHktLn5bo/>



KOMINFO

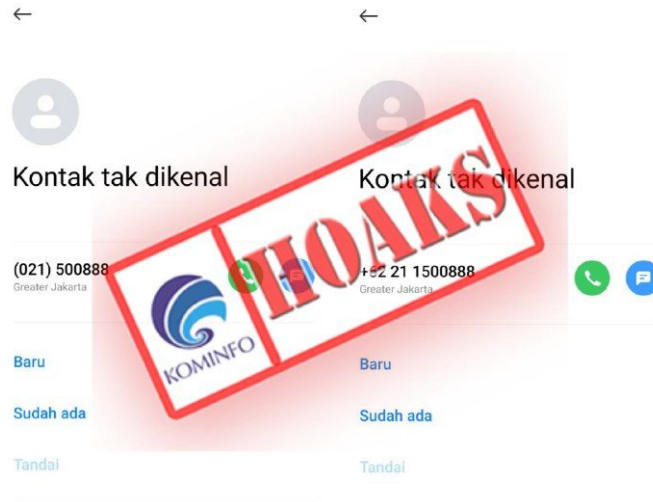
LAPORAN ISU HOAKS

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Senin, 6 September 2021

4. [HOAKS] Nomor Telepon Mengatasnamakan Bank BCA



Penjelasan :

Beredar nomor telepon +6221-1500888 atau 021-500888 yang mengatasnamakan Bank BCA.

Faktanya, *Executive Vice President Secretariat & Corporate Communication* BCA, Hera F. Haryn menyatakan bahwa nomor tersebut adalah penipuan. Para penipu melakukan aksinya tersebut dengan menggunakan aplikasi Fake Caller. Diketahui nomor resmi Halo BCA 1500888 tanpa ada embel-embel +62, 021, atau apapun. Jika menemukan aktivitas mencurigakan Hera mengimbau agar segera hubungi Halo BCA di 1500888, Twitter [@HaloBCA](https://twitter.com/HaloBCA), email halobca@bca.co.id, atau WhatsApp Bank BCA 08111500998.

Hoaks

Link Counter:

- <https://finance.detik.com/moneter/d-5710780/hati-hati-ada-penipuan-bawa-bawa-nama-bca-kenali-modusnya>



KOMINFO

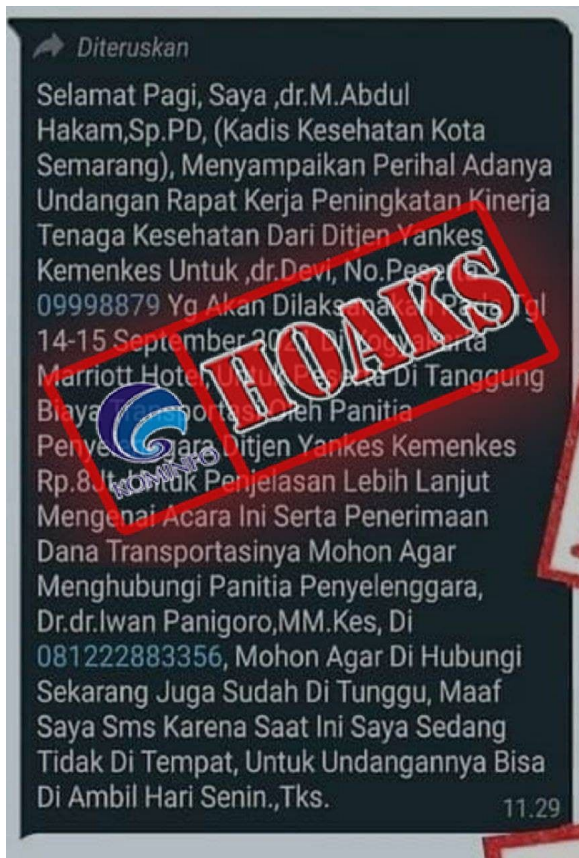
LAPORAN ISU HOAKS

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Senin, 6 September 2021

5. [HOAKS] Undangan Rapat Peningkatan Kinerja Mengatasnamakan Kadis Kesehatan Kota Semarang



Penjelasan :

Beredar sebuah pesan WhatsApp mengatasnamakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang dr. Moch Abdul Hakam Sp.PD dan mengirimkan undangan kegiatan Rapat Kerja Peningkatan Kinerja Tenaga Kesehatan yang diklaim akan dilaksanakan pada 14-15 September 2021 di Hotel Marriott Yogyakarta. Pada pesan tersebut disebutkan juga bahwa setiap peserta mendapatkan uang transportasi sebesar 8 juta rupiah dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

Faktanya, dilansir dari akun Instagram Dinas Kesehatan Kota Semarang [@dkksemarang](https://www.instagram.com/dkksemarang) bahwa pesan WhatsApp tersebut adalah tidak benar. Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kota Semarang dr. Moch Abdul Hakam Sp.PD tidak pernah mengirimkan pesan tersebut.

Hoaks

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CTZHBIGPzYZ/?utm_medium=copy_link
- https://www.instagram.com/p/CTZJUMwnYLb/?utm_medium=share_sheet



KOMINFO

LAPORAN ISU HOAKS

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Senin, 6 September 2021

6. [DISINFORMASI] Perihal Pemindahan Ibu Kota, Jokowi: Kita Bisa Jual Separuh Dari Pulau Kaltim



Penjelasan :

Sebuah akun Facebook mengunggah tangkapan layar berupa judul artikel pada situs Reportase Indonesia berjudul "Perihal Pemindahan Ibukota, Jokowi: Kita Bisa Jual Separuh Dari Pulau Kaltim".

Berdasarkan penelusuran, di dalam artikel pada situs Reportase Indonesia tidak terdapat penjelasan bahwa Presiden Jokowi bakal menjual separuh Kaltim untuk pemindahan ibu kota. Isi artikel itu menyebutkan bahwa Jokowi memang berencana menjual sebagian lahan ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kaltim. Namun, lahan yang dijual hanya seluas 30 ribu hektare. Langkah itu diambil karena lahan seluas 180 ribu hektare yang diperuntukkan bagi ibu kota baru terlalu luas. Melansir dari artikel iNews.id berjudul "Biayai Pemindahan Ibu Kota Rp466 T, Jokowi Usul Jual Tanah Negara di Kaltim" yang dimuat pada 4 September 2019. Dalam artikel itu disebutkan bahwa lahan yang akan digunakan untuk ibu kota pada tahap awal hanya seluas 40 ribu hektare. Sementara lahan yang akan digunakan untuk pengembangan ibu kota dalam jangka panjang seluas 110 ribu hektare. Karena itu, sisanya yang seluas 30 ribu hektare direncanakan untuk dijual. Meskipun begitu, Jokowi menuturkan bahwa penjualan lahan tersebut dikhususkan untuk pembeli individu, bukan perusahaan, termasuk pengembang properti. Jokowi meyakini hasil penjualan tanah negara ini bakal cukup untuk membiayai pemindahan ibu kota. Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa pembelian tanah itu harus disertai dengan pembangunan minimal dua tahun setelah membeli. Jika lewat batas dua tahun, negara akan mengambil alih tanah melalui sebuah badan otoritas pengelola ibu kota baru.

Disinformasi

Link Counter:

- <https://cekfakta.tempo.co/fakta/670/fakta-atau-hoaks-benarkah-presiden-jokowi-akan-jual-separuh-kaltim-untuk-pemindahan-ibu-kota>
- <https://www.inews.id/finance/makro/biayai-pemindahan-ibu-kota-rp466-t-jokowi-usul-jual-tanah-negara-di-kaltim>
- <https://kaltim.bps.go.id/indicator/153/74/1/luas-wilayah-menurut-kabupaten-kota.html>